

**MOTIVASI AUSTRALIA MEMBERIKAN BANTUAN PENDIDIKAN
KEPADA MADRASAH DI INDONESIA MELALUI PROGRAM AUSAID
TAHUN 2011-2014**

Oleh:

Bella Risasta

Bella.risasta@gmail.com

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

**Bibliografi: 5 Buku, 2 Jurnal, 1 Perjanjian Internasional, 1 Makalah
Konferensi dan 4 Situs Internet**

Jurusan Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax.

0761-63277

ABSTRACT

This paper aims to explain the motivation of Australia in providing foreign aid, especially aid to Indonesia in Islamic education sub-sector. Australia provides assistance to Indonesia through the International donor agencies namely Australia Agency for International Development (AusAID), which is currently under arrangements Ministry Foreign Affairs and Trade of Australia. Through AusAID, Australia has provided assistance to the sub-sectors of madrasa education in the form of block grants and training assistance in order to improve the quality and the quality of the madrasah.

This study uses the perspective of realism where realism view that foreign aid is one of the tools of diplomacy when there is a state interest which cannot be achieved only by using military force. This paper also uses a combination of public diplomacy theory and the concept of soft power at the level of the nation state analysis.

The results from this study consider that Australia provides assistance to sub-sector madrasa education with the aim to dampen radicalism in madrassas. This can be seen from the formulation aid that began after the Bali bombing and the provision which requires madrassas should be tolerant, open and willing to instill the value of pluralism.

Keywords: Foreign Assistance, Education Assistance, AusAID, Radicalism, Madrasa Education Sub-Sector, Education Partnership.

Pendahuluan

Pemberian bantuan pendidikan ke madrasah di Indonesia dimulai pada tahun 2005/2006 menyusul terjadinya bom Bali pada 2002 dan 2005 yang oleh orang Barat sering dikaitkan dengan aktivitas dari Jihad kelompok Islam radikal di Indonesia setelah tertangkapnya tersangka yang kemudian diketahui memiliki latar belakang pendidikan di madrasah yang terafiliasi ke dalam sebuah pondok pesantren. Islam garis keras bagi Australia jauh lebih mengancam daripada terorisme dikarenakan Islam garis keras memiliki tempat di dalam kehidupan sosial masyarakat dimana mereka bisa dapat bertindak sebagai pemangku kepentingan yang dapat menekan pemerintah dan memiliki *bargaining position* di dalam sistem sosial dan politik.

Australia memandang bahwa salah satu cara terbaik untuk meredam perkembangan Islam garis keras adalah dengan mendukung perubahan di bidang pendidikan. Australia kemudian merancang sebuah program bantuan luar negeri yang ditujukan bagi perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia yang masuk ke dalam bagian pendidikan dasar Indonesia dan bagian dari sub sektor pendidikan Indonesia. Bantuan tersebut kemudian didistribusikan melalui lembaga AusAID (*Australian Agency for International Development*) sebagai agen di dalam menerapkan kepentingan Australia terhadap Indonesia. AusAID merupakan sebuah lembaga bantuan pembangunan luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah federal Australia yang telah berdiri sejak 1 Desember 1973 dengan nama ADAA

(*Australian Development Assistance Agency*).

AusAID kemudian menjalin kemitraan dengan Indonesia dengan membawa nama pemerintah Australia dan membentuk kemitraan pendidikan dengan pemerintah Indonesia. Untuk periode pertama (2006-2010), dana yang dianggarkan oleh pemerintah Australia untuk pendidikan Indonesia ialah AUD387,6 juta yang difokuskan untuk pembangunan Unit Madrasah Baru melalui MTs Satu Atap dan MTs Pesantren Baru.

Sedangkan pada periode kedua (2011-2016) Australia memberikan bantuan sebesar AUD500 juta dimana dananya dialokasikan AUD215,7 juta bagi pembangunan sekolah dengan harapan untuk meningkatkan akses bagi wajib belajar 9 tahun baik untuk anak laki-laki maupun perempuan serta bagi anak-anak dengan keterbatasan fisik. Sebanyak AUD188,3 juta dialokasikan bagi manajemen sekolah melalui pelatihan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), peningkatan akreditasi di seluruh Indonesia melalui pemberian pelatihan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah dan pejabat instansi terkait di dalam mengelola kegiatan sekolah dan keuangan, dana bagi kemitraan untuk pengembangan analitis dan kapasitas yang akan mengukur efektifitas pemberian bantuan sebesar AUD24 juta dan sisanya sebesar AUD47 juta digunakan secara khusus untuk meningkatkan akreditasi 1500 madrasah.¹

¹ *Subsidiary Arrangement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership With*

Selain itu Australia juga memberikan bantuan secara langsung sebanyak AUD10.000 yang berfungsi sebagai dana block grant kepada madrasah sasaran dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Bantuan tersebut diberikan melalui tiga tahapan yakni AUD1.000, AUD7.000 dan AUD2.000 yang disebar ke provinsi-provinsi di Indonesia.

Tindakan Australia yang berupaya mendekatkan diri dengan memberikan bantuan dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk diplomasi publik dengan menggunakan *soft power* dimana *outcomes* yang diharapkan ialah mampu untuk mempengaruhi perkembangan pada madrasah. Sebagaimana dikatakan oleh Voving bahwa ada tiga aspek yang akan menambah keefektifan *soft power* yaitu *benignity*, *brilliance* dan *beauty*. Tiga aspek tersebut juga digunakan oleh Australia dimana Australia menunjukkan kedermawanannya (*benignity*) dengan memberikan bantuan dana sehingga nantinya tindakan tersebut akan menimbulkan rasa terima kasih dan simpati dari penerima. Rasa simpati tersebut kemudian akan berlanjut ketika Australia menunjukkan *brilliance* dan *beauty* melalui pemberian latihan yang diberikan kepada madrasah di Indonesia sehingga akan meningkatkan *bargaining position* dan membuat pihak lain ingin meniru.

Bantuan Pendidikan Australia kepada Indonesia

Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program.

Di dalam kerangka strategis kemitraan antara Indonesia dan Australia terdapat empat pilar utama yang menjadi sasaran utama di dalam pembangunan di Indonesia. Keempat pilar tersebut ialah Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi, Investasi untuk pembangunan manusia, Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik serta Keamanan dan kedamaian. Bantuan pendidikan Australia kepada Indonesia termasuk ke dalam pilar yang kedua yakni investasi untuk pembangunan manusia.

Investasi untuk pembangunan manusia dilaksanakan oleh pemerintah Australia salah satunya ialah dengan bantuan peningkatan mutu, akses dan penanganan pendidikan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah Australia memberikan bantuan pendidikan yang terdiri atas bantuan pendidikan dasar melalui program AIBEP (*Australian Indonesia Basic Education Program*), Pemberian Beasiswa melalui *Australian Development Scholarships*, *Australian Leadership Awards* dan *Endeavour Scholarships*, BRIDGE (*Building Relations Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement*).

Program AIBEP dimulai pada bulan April 2006 dan berakhir pada Juni 2010 untuk tahap I. Program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia di dalam meningkatkan akses untuk peningkatan kualitas pada bidang pendidikan dasar. Secara spesifik

program AIBEP memiliki empat program utama yaitu²:

1. Mencapai target kuantitatif untuk pembangunan gedung sekolah. AIBEP menargetkan pembangunan 1510 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan 504 sekolah dibangun dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Mendirikan 330.000 unit sekolah baru baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
3. Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaksanakan program *Capacity-building* seperti *Whole School Development and Whole District development*.
4. Peningkatan manajemen dan tata kelola sistem pendidikan secara keseluruhan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Program Australia Awards melalui AusAID dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan kapasitas dan kemampuan kepemimpinan tiap individu yang

mengikutinya agar dapat memberikan sumbangsih untuk pembangunan di dalam negeri (negara penerima beasiswa). Untuk Indonesia, cakupan program Australia Awards terdiri atas *Australia Awards Fellowships* dan *Australia Awards Leadership Program*.

Pada tahun 2011, Pemerintah Australia memberikan dana sebesar AUD273,2 juta untuk program *Australia Awards* yang ditujukan bagi 4400 akademisi dan para profesional. Indonesia, di samping Vietnam dan Papua Nugini, merupakan negara penerima *Australia Awards* tertinggi dimana sekitar 14,8% penerima beasiswa atau 654 orang dari total 4400 penerima beasiswa ialah orang Indonesia.³

Australia Awards scholarship, yang di dalamnya mencakup *Australia Leadership Scholarship* dirancang untuk memberi pelatihan keterampilan pengetahuan akademis agar para perorangan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Indonesia. Beasiswa ini dilaksanakan dengan studi dan penelitian di bidang strategis yang dapat menunjang rencana pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana yang tertera di dalam program-program Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia. *Australia Awards scholarship* memberikan kesempatan baik dari sektor negeri maupun sektor swasta yang dianggap sebagai mitra strategis dari *Australia Awards Scholarship*, dimana pada tahun 2011 sebanyak 33% penerima

² Independent Completion Report, 2010, *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP)*, tersedia di: <<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/2010indoaiibepicr.pdf>> diakses tanggal 20 Februari 2015

³ Australia Awards, *Annual Progress Report: Volume 02*, (Jakarta: AusAID, 2013) Hal. 7

beasiswa berasal dari sektor swasta dan sisanya dari sektor negeri.⁴

Program BRIDGE merupakan sebuah program dari Pemerintah Australia di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesalingpahaman di bidang budaya antara kedua belah pihak. BRIDGE Indonesia dan Australia berupaya menghubungkan guru-guru, murid dan sekolah di Indonesia dan Australia melalui peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan Indonesia serta membangun kesalingpahaman budaya antara keduanya.⁵

Pembentukan program BRIDGE didasari adanya kesadaran bahwa pemahaman terhadap perbedaan budaya merupakan hal yang penting bagi generasi muda di dalam menghadapi abad ke 21. Itu sebabnya program BRIDGE sangat mendukung dialog antar budaya yang dijalin antara siswa dan guru yang berbeda negara dengan menggunakan teknologi yang inovatif. Tujuan dari program ini ialah⁶:

1. Mendukung guru secara profesional untuk belajar menggunakan teknologi di dalam mengembangkan pemahaman antar budaya.

⁴ *Ibid.*, hal. 29

⁵ DFAT, Education assistance in Indonesia, tersedia di:
<<http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/education-assistance-in-indonesia.aspx>> diakses tanggal 10 April 2015

⁶ DFAT, Bridge Project, tersedia di:
<<http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-institutes/australia-indonesia-institute/programs/Pages/bridge-project.aspx>> diakses tanggal 10 April

2. Menyediakan peluang bagi para guru, murid dan sekolah untuk belajar dengan sekolah mitra di Indonesia dan begitu juga sebaliknya.

3. Bagi Australia, program ini mendukung penerapan Deklarasi Melbourne terhadap tujuan pendidikan bagi kaum muda Australia, Kurikulum Australia serta Revolusi pendidikan secara digital.

Kegiatan utama yang direncanakan untuk dilakukan di program BRIDGE ialah program kunjungan guru dimana program ini memfasilitasi guru-guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah di Australia dengan tujuan menambah pengalaman, pemahaman dan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan sebagai guru.⁷ Dampak lain yang diharapkan dari kunjungan guru Indonesia ke Australia ini ialah menjalin hubungan sekolah sebagai *sister school*.

Beberapa contoh *sister school* yang telah berhasil di jalin diantaranya adalah antara MTs Al Azhar dengan The Scots PGC College, SMAN 1 Salatiga dengan Browns Plains State High School, MAN 3 Malang dengan Aquinas College, SMPN 1 Sungai Raya dengan Daramalan College, SMA Katolik Santo Petrus Pontianak dengan Hawker College.⁸

⁷ Billy Anggara, 2014, Dampak Kerjasama Indonesia-Australia: Bidang Pendidikan (Studi Kasus Sister School SMPN1 Tasikmalaya dengan Glenunga International High School Australia) 2012, JOM Fisip 1 (2) Hal. 5

⁸ Asia Education Foundation, BRIDGE Partner School, tersedia di:

Australia Ingin Tidak Berkembangnya Radikalisme di Lingkungan Madrasah

Bantuan yang diberikan kepada madrasah dalam rangka meredam radikalisme di madrasah diberikan melalui program-program bantuan pendidikan dan pelatihan seperti program SSQ (*School Systems and Quality*) yang terdiri atas 3 komponen. Dimana komponen pertama ditujukan bagi konstruksi untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan. Komponen kedua ditujukan untuk kapasitas distrik peningkatan distrik. Sedangkan komponen ketiga dikhususkan untuk akreditasi di kementerian agama yang pembahasannya berfokus pada percepatan akreditasi madrasah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Yang akan menjadi target penerima bantuan AusAID di komponen 3 SSQ ini ialah madrasah swasta yang belum terakreditasi atau tidak lolos akreditasi yang memiliki komitmen untuk terus maju serta bersedia menanamkan nilai-nilai pluralisme.⁹

Program kemitraan antara Australia dengan Indonesia melalui SSQ C3 dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan menargetkan sekitar 1500 madrasah. Untuk tahapan pertama akan dipilih 569 madrasah dari 7 provinsi sasaran utama yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk tahap II akan

dipilih hingga 900 madrasah dan untuk tahap III akan dipilih 500 madrasah.¹⁰

Program percepatan akreditasi madrasah melalui SSQ C3 sebenarnya juga masih berada di bawah program LAPIS (*Learning Assistance Program for Islamic Schools*) yang merupakan bagian dari AusAID. Jika pada periode sebelumnya LAPIS lebih fokus kepada pembangunan madrasah dan peningkatan mutu madrasah melalui pemberian latihan teknis dan non-teknis, maka pada periode ini LAPIS lebih fokus kepada peningkatan kuantitatif madrasah yang mencapai akreditasi.

Learning Assistance Program for Islamic Schools (LAPIS) merupakan sebuah program yang didukung oleh Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah-sekolah Islam (Madrasah) di Indonesia. Program ini pertama kali dimulai bersamaan dengan dimulainya program bantuan pendidikan dari Australia kepada madrasah di Indonesia dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Direktorat Madrasah. Sejarah pembentukan LAPIS dimulai pertama kali pada tahun 2004 di bulan Mei sebagai respon atas perintah dari Menteri Luar Negeri Australia untuk terlibat dengan pendidikan Islam di Indonesia pasca terjadinya bom Bali.

Tujuan diadakannya program LAPIS ialah untuk membangun sistem yang lebih kuat pada institusi

<<http://www.asiaeducation.edu.au/programmes/school-partnerships/partnerschools/act>> diakses tanggal 12 April 2015

⁹ UPPAM, 2012, "Tanya Jawab Seputar Program Akreditasi Madrasah yang Didukung Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia" *Gema Madrasah* Edisi II Hal. 16

¹⁰ UPPAM, 2012 "SSQ C3 Sosialisasi Dana Hibah di Tiga Provinsi" *Gema Madrasah* Edisi II Hal. 7

ataupun kelompok yang berkaitan dengan sektor pendidikan dasar Islam. Tujuan tersebut memiliki tiga sasaran yaitu¹¹:

1. Meningkatkan kapasitas dari lembaga bantuan untuk memberikan kualitas layanan pendidikan di pendidikan dasar sub sektor Islam
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola madrasah dan meningkatkan kualitas madrasah
3. Untuk meningkatkan kapasitas jaringan lokal untuk meningkatkan komunitas madrasah mereka.

Dukungan Australia terhadap pendidikan Islam di Indonesia melalui peningkatan mutu madrasah juga ditunjukkan melalui upaya untuk melakukan pendekatan kepada sekolah secara menyeluruh. Pendekatan sekolah secara menyeluruh tidak hanya bagian tertentu saja termasuk visi dan kebijakan sekolah, kurikulum dan metode pengajaran, kepemimpinan dan manajemen, budaya, aktivitas murid dan kolaborasi dengan masyarakat luas yang dianggap berperan di dalam mempromosikan toleransi di dalam sekolah. Program manajemen berbasis sekolah ini melibatkan banyak pihak seperti kebijakan sekolah, guru, pihak manajemen sekolah, murid, orang tua dan dewan sekolah di dalam berbagai aktivitasnya untuk menerapkan nilai pendidikannya. Pendekatan berbasis sekolah ini telah

digunakan oleh Australia untuk di dalam sistem pendidikannya.¹²

Untuk menjadikan madrasah sebagai institusi yang akan mengajarkan toleransi dan meminimalisir radikalisme harus dimulai dari visi madrasah. Visi madrasah kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian tindakan yang disebut misi agar visi dapat tercapai. nilai, kepercayaan dan kondisi yang ideal suatu sekolah akan direfleksikan melalui kebijakan dan visi madrasah. Hal yang tidak kalah penting dari pembentukan visi madrasah ialah manajemen dan kepemimpinan madrasah. Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan menggiring madrasah menjadi institusi yang lebih toleransi. Hal lain yang juga menjadi faktor penentu di dalam pendekatan berbasis sekolah ialah kurikulum dan metode pengajaran. Pencapaian akreditasi yang rendah di tingkat madrasah menjadi salah satu bukti bahwa madrasah belum sepenuhnya dapat menerapkan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan nasional. Padahal kurikulum dan metode pengajaran guru menjadi salah satu faktor di dalam mempromosikan toleransi di lingkungan sekolah.¹³

Pencapaian standar pendidikan nasional pada lingkungan madrasah juga menjadi faktor penting di dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Adapun 8 standar nasional pendidikan ialah standar kompetensi lulusan, standar

¹¹ LAPIS, *op.cit.*, hal. 2

¹² Raihani, 2011, "A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia", *Theory and Research in Education* 9(1) Hal. 27 tersedia di: <<http://tre.sagepub.com/content/9/1/23>>

¹³ *Ibid.*, hal. 30-32

isi, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian pendidikan.¹⁴ Tujuan lain diterapkannya standar nasional pendidikan pada madrasah ialah untuk meningkatkan kapasitas madrasah karena madrasah akan dituntut untuk terus meningkatkan mutu agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Agar keberhasilan program dapat tercapai maka Australia juga menyertakan pendamping madrasah dengan membentuk SNIP (*Sub National Implementation Partner*) yang merupakan mitra pelaksana daerah atau lembaga mitra lokal yang berdiri sebagai pihak ketiga dan bertugas untuk memberikan dukungan teknis serta mendampingi madrasah di dalam mencapai akreditasi dan standar pendidikan nasional. Setiap provinsi yang madrasahnyanya mendapatkan bantuan dari program kemitraan Australia Indonesia akan dibentuk SNIP Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari AusAID untuk mengimplementasikan bantuannya

SNIP dipilih berdasarkan proses seleksi dari lembaga yang tertarik untuk menjadi lembaga mitra. Proses seleksi dilaksanakan dengan melakukan penilaian kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan melalui seleksi administrasi. Setelah itu dilakukan dengan penilaian lapangan (*in field assessment*) dengan mengunjungi

¹⁴ BSNP, Standar Nasional Pendidikan, tersedia di: <http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61> diakses tanggal 10 Mei 2015

kantor calon lembaga mitra sekaligus melaksanakan wawancara. Setelah itu barulah lembaga mitra yang cocok dipilih oleh UPPAM (Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah) dan C3 yang direkomendasikan kepada Direktur Pendidikan Madrasah dan mendapatkan persetujuan dari AusAID.¹⁵ Tujuan dilakukannya penilaian terhadap mitra lokal ialah untuk melihat kemampuan mitra lokal atau SNIP di dalam mengelola program dan anggaran yang besar dalam konteks pendampingan teknis.

Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh SNIP kepada madrasah ialah¹⁶:

1. Mendukung madrasah di dalam menilai kebutuhan untuk perkembangan madrasah termasuk di dalamnya membantu menganalisa kesenjangan standar mutu yang terjadi di madrasah.
2. Memberikan bantuan teknis kepada madrasah di dalam mengembangkan Rencana Kerja Madrasah (RKM) hingga membantu menyusun anggaran pembiayaannya yang didalamnya membahas mengenai rencana kegiatan dan pembiayaan untuk dana hibah.

¹⁵ UPPAM, "Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Komponen 3 Akreditasi Madrasah" *Gema Madrasah* Edisi I Hal. 9

¹⁶ UPPAM, 2012, "Tanya Jawab Seputar Program Akreditasi Madrasah yang Didukung Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia " *Gema Madrasah* Edisi II Hal. 16

3. Mendampingi madrasah di dalam mengimplementasikan dana hibah untuk memastikan madrasah sepenuhnya melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh kemitraan Australia Indonesia di bidang pendidikan madrasah.
4. Mengawasi pembelanjaan dana hibah yang dilakukan oleh madrasah serta melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilakukan berdampak pada madrasah.
5. Mendampingi madrasah di dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh SSQ.
6. Memperkuat jaringan madrasah dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Bantuan Australia kepada Madrasah di Indonesia

Bantuan Australia kepada madrasah di Indonesia dapat dibagi atas bantuan dana untuk akreditasi madrasah, pemberian dana *block grant* kepada Madrasah sasaran yang terpilih, serta memberikan dana untuk mendukung program pendampingan madrasah. Di dalam *Subsidiary Arrangement* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang berkenaan dengan kemitraan pendidikan Australia Indonesia telah disebutkan bahwa Australia akan memberikan bantuan dana sebesar AUD47 juta yang digunakan untuk mendukung program akreditasi madrasah di

Indonesia yang menargetkan 1500 madrasah mencapai akreditasi.

Pemberian dana *block grant* yang diberikan secara langsung ke madrasah sebesar AUD10.000 merupakan tahap lanjutan dari program percepatan akreditasi yang ditujukan untuk madrasah. Untuk dapat memperoleh dana *block grant*, madrasah harus mengajukan proposal yang isinya membahas mengenai rencana kerja madrasah dan perkiraan biaya yang diperlukan. Dana AUD10.000 ini akan diberikan sebagai dana untuk peningkatan mutu madrasah. Namun di dalam pelaksanaannya, ada ketentuan yang harus diikuti dari penggunaan dana *block grant* ini.

Madrasah hanya diizinkan untuk dapat menggunakan dana *block grant* sebesar AUD10.000 ini untuk¹⁷:

1. Melakukan renovasi dalam skala ringan seperti melakukan pengecatan ruangan dan memindahkan taman serta melakukan perbaikan kecil pada sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar siswa seperti perpustakaan, toilet dan unit kesehatan sekolah.
2. Menggunakan jasa layanan profesional untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan renovasi ringan.
3. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa dan pelatihan bagi guru, penyusunan rencana kerja

¹⁷ UPPAM, "Gema Madrasah Edisi II", *loc.cit*

madrasah dan meninjau penggunaan kurikulum di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Penyediaan sarana yang terkait dengan pelatihan dan sumber-sumber belajar seperti perlengkapan perpustakaan, perlengkapan kelas dan kantor, perangkat sanitasi, kebersihan dan kesehatan, pembelian buku ajar, modul lab dan media pembelajaran lainnya.

Ketentuan penggunaan dana juga diatur, dimana untuk penggunaan dana seperti perbaikan bangunan dalam skala ringan hanya diizinkan maksimum 40% dari total dana yang diberikan sedangkan untuk pembelian media pembelajaran, fasilitas ruangan dan kegiatan pelatihan dapat digunakan minimum 60% dari total dana yang diberikan kepada madrasah.

Lembaga mitra lokal dan kontraktor merupakan pihak ketiga yang dipercaya AusAID untuk menjamin berlangsungnya program kemitraan pendidikan Australia Indonesia. Australia secara khusus mengalokasikan dana untuk mendukung berlangsungnya aktivitas lembaga mitra lokal dan kontraktor yang dipilih Australia. Berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia mengenai kemitraan pendidikan, Australia akan mengalokasikan dana sebesar AUD24 juta untuk kontraktor yang akan mendampingi madrasah dan memberikan evaluasi penilaian mengenai program kemitraan. Ada beberapa alternatif yang biasa dipilih

untuk menjadi lembaga mitra lokal yaitu MDC (*Madrasah Development Centre*), perguruan tinggi agama Islam, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Lembaga mitra lokal di tiap provinsi biasa diseleksi berdasarkan proposal yang mereka ajukan dan kemudian lembaga mitra lokal terpilih akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana teknis implementasi program di daerah.

Simpulan

Bantuan yang diberikan oleh Australia sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk investasi jangka panjang Australia untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya sebagaimana yang dikatakan di dalam situs resmi DFAT bahwa bantuan yang diberikan ke tiap negara akan disesuaikan dengan kebutuhan negara dan mencerminkan kepentingan nasional Australia.

Pasca terjadinya bom bali II pada tahun 2004, Australia kemudian menyadari bahwa tindakan radikalisme yang terjadi di Indonesia akan mengancam kepentingan nasional Australia yang sedang melakukan perubahan kebijakan dan berupaya untuk mendekatkan diri pada Asia. Untuk itu Australia kemudian mempersiapkan tindakan untuk mencegah berkembangnya radikalisme dengan memberikan bantuan di bidang pendidikan khususnya pendidikan di madrasah. Madrasah dipilih sebagai salah satu sub-sektor pendidikan yang akan mendapatkan bantuan karena stigma terhadap madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang cenderung bersifat tertutup (terutama pada model madrasah yang terintegrasi

dengan pesantren) dan perkembangannya cenderung lambat jika dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu adanya keterlibatan lulusan madrasah pada Bom Bali juga menambah stigma negatif yang ada pada madrasah.

Tindakan nyata dari keinginan Australia untuk meredam radikalisme di madrasah dapat dilihat dari adanya prasyarat dalam pemberian bantuan kepada madrasah sasaran seperti penggunaan mazhab yang diajarkan di madrasah atau guru harus bersifat toleran dan moderat, bersedia menanamkan nilai-nilai pluralisme serta kepemimpinan madrasah yang dituntut untuk bersifat terbuka dan berpandangan luas. Tuntutan ini dilakukan agar nantinya madrasah dapat menerima nilai-nilai baru. Hasil akhir yang ingin dicapai oleh Australia terhadap perkembangan pendidikan di madrasah ialah adanya perubahan paradigma pada madrasah seperti penerimaan terhadap nilai-nilai pluralisme, peningkatan toleransi dan bersifat lebih terbuka.

Daftar Pustaka

- Asia Education Foundation, *BRIDGE Partner School*, tersedia di: <<http://www.asiaeducation.edu.au/programmes/school-partnerships/partner-schools/act>> diakses tanggal 12 April 2015
- Australia Awards, 2013, *Annual Progress Report: Volume 02*, Jakarta: AusAID
- Billy Anggara, 2014, Dampak Kerjasama Indonesia-Australia: Bidang Pendidikan (Studi Kasus Sister School SMPN1 Tasikmalaya dengan Glenunga International High School Australia) 2012, *JOM Fisip* 1 (2)
- BSNP, *Standar Nasional Pendidikan*, tersedia di: <http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61> diakses tanggal 10 Mei 2015
- DFAT, *Bridge Project*, tersedia di: <<http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-institutes/australia-indonesia-institute/programs/Pages/bridge-project.aspx>> diakses tanggal 10 April
- DFAT, *Education assistance in Indonesia*, tersedia di: <<http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/education-assistance-in-indonesia.aspx>> diakses tanggal 10 April 2015
- Independent Completion Report, 2010, *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP)*, tersedia di: <<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/2010indoaibepicr.pdf>> diakses tanggal 20 Februari 2015
- Raihani, 2011, "A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia", *Theory and Research in Education* 9(1) Hal. 27 tersedia di: <<http://tre.sagepub.com/content/9/1/23>>
- Subsidiary Arrangement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia*

Relating to Australia's Education Partnership With Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program.

UPPAM, "Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Komponen 3 Akreditasi Madrasah" *Gema Madrasah Edisi I*

_____, 2012 "SSQ C3 Sosialisasi Dana Hibah di Tiga Provinsi" *Gema Madrasah Edisi II*

_____, 2012, " Tanya Jawab Seputar Program Akreditasi Madrasah yang Didukung Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia " *Gema Madrasah Edisi II*

Vuving, A.L., 2009. "How Soft Power Works". dipresentasikan di: *American Political Science Association annual meeting*. Toronto, 3 September 2009. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.